



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 5 September 2019
Waktu	: Pukul 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BNPB Tahun 2020
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si,
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Kepala BNPB Beserta Jajaran

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 16.35 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.
3. Rapat di skors Sampai Pukul 18.35 dan dibuka pada pukul 19.03.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda membahas “Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana,” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

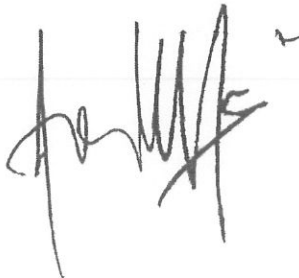
1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Anggaran tahun 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp.700.646.814.000,- (*Tujuh Ratus Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) yang dialokasikan untuk program:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya sebesar Rp213.608.214.000,- (*Dua Ratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*)
 - b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB sebesar Rp8.924.900.000,- (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*)
 - c. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp478.113.700.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)
2. Komisi VIII DPR RI dapat menerima usulan tambahan anggaran BNPB sebesar Rp689.761.774.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang dialokasikan untuk :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya sebesar Rp55.879.210.000,- (*Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)
 - b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB sebesar Rp11.213.170.000,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)
 - c. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp622.669.394.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Milyar Enam ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*)

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan BNPB terkait usulan *Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP)* dalam Program Peningkatan Tata Kelola Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan terhadap bencana yang didanai oleh World Bank. Untuk itu Komisi VIII DPR RI meminta BNPB untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, Bappenas dan Kementerian lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam pemanfaatannya.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dalam penyusunan RKA/KL Tahun 2020, dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan program sosialisasi / edukasi / simulasi terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kearifan lokal.
 - b. Mendesak BNPB untuk dapat menggunakan dana siap pakai sesuai dengan peraturan dan pemanfaatan yang tepat dan efisien.
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang telah digunakan untuk efisiensi anggaran.
 - d. Mendesak BNPB untuk mempercepat respon dalam proses revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 19.27 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si,